

DUKUNGAN ARAB SAUDI TERHADAP KUDETA YANG DILANCARKAN MILITER MESIR KEPADA PRESIDEN MUHAMMAD MURSI 2013

Intan Perceka

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ringroad Barat Tamantirto, Kasihan, Bantul 55138

Email: intanperceka7@yahoo.com

Abstract

Saudi Arabia and The Moslem Brotherhood have good relationship that has existed since 1928 until now, where Saudi Arabia headed by King Salman. The Moslem Brotherhood is an Islamic Organization that become a background of President Mohammad Mursi. As a country that has power in the Middle East, Saudi Arabia has always shown his attitude in the coups in the countries of the region. Not least his attitude towards the coup in Egypt in 2013. If in the coup of other countries, Saudi Arabia has given a reasonable respon, it is not to the coup in Egypt. Saudi Arabia has given an unreasonable respon by being an aggressive. Saudi Arabia directly involved and provide support both morally and materially. Although many people condemned the coup, but the support of Saudi Arabia continues to support the regime that thwart democracy in Egypt. This journal will explain why Saudi Arabia has supported the coup on Mohammad Mursi.

Keywords : The foreign policy of Saudi Arabia, The Coup in Egypt in 2013, The Moslem Brotherhood

Intisari

Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin memiliki hubungan baik yang sudah terjalin sejak tahun 1928 hingga sekarang yang mana Arab Saudi dipimpin oleh Raja Salman. Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi Islam yang menjadi latar belakang Presiden Muhammad Mursi. Sebagai negara yang memiliki kekuasaan di kawasan Timur Tengah, Arab Saudi selalu menunjukkan sikapnya dalam kudeta di negara-negara kawasan tersebut, tidak terkecuali sikapnya terhadap kudeta di Mesir tahun 2013. Jika kepada kudeta negara lain Arab Saudi memberikan respon yang sewajarnya, maka tidak demikian dengan kudeta di

Mesir. Arab Saudi bersikap tidak wajar dengan menunjukkan sikap yang agresif. Arab Saudi terlibat langsung dan memberikan bantuan baik moril maupun materil. Meskipun banyak pihak mengecam kudeta, namun dukungan Arab Saudi terus berlanjut untuk mendukung rezim yang menggagalkan demokrasi di Mesir tersebut. Jurnal ini akan menjelaskan tentang mengapa Arab Saudi mendukung kudeta atas Muhammad Mursi.

Kata Kunci : Kebijakan luar negeri Arab Saudi, kudeta di Mesir tahun 2013, Ikhwanul Muslimin

PENDAHULUAN

Hubungan baik antara Arab Saudi dan IM (selanjutnya dipakai sebagai kepanjangan dari Ikhwanul Muslimin) sudah dimulai sejak tahun 1928. Dibuktikan dengan adanya hubungan kemitraan yang terbangun antara Hasan Al Banna sebagai pendiri Ikhwanul Muslimin dengan beberapa tokoh penting Arab Saudi, salah satunya adalah dengan Raja Abdul Aziz. Hubungan tersebut berlanjut pada hubungan yang lebih erat hingga Hasan Al Banna bisa mempelajari salafisme dari Raja Arab tersebut.

Hubungan baik berlanjut pada kedekatan ideologis dan pendanaan antara IM dengan Arab Saudi. Pada tahun 1945, isu Palestina digunakan Ikhwanul Muslimin untuk membangun aliansi dengan Saudi. Bahkan, Arab Saudi pun begitu simpati terkait kasus hukuman mati Sayyed Al Qutb, hingga tahun 1966 Arab Saudi mengirimkan surat himbauan atas keberatan penjatuhan hukuman mati tersebut. Tak hanya itu, Arab Saudi pun meminta organisasi IM (Ikhwanul Muslimin) untuk membuka cabang di negaranya dan beberapa negara Teluk yang lain, serta mengontrol beberapa lembaga swadaya masyarakat di Arab Saudi. Tidak hanya terkait hal yang bersifat politis ideologis, namun hubungan baik keduanya pun terlihat dalam bidang

pendanaan. Selama beberapa dekade, Kerajaan Arab Saudi telah menggelontorkan dolarnya dari kekayaan minyak untuk membantu Ikhwanul Muslimin (Wadjdi, 2013).

Sikap baik itu berubah setelah kejadian diturunkannya Husni Mubarak sebagai presiden Mesir tahun 2011. Saudi melihat IM lebih sebagai ancaman dibanding teman. Hal tersebut menjadi keprihatinan tersendiri bagi pihak Mursi. Padahal, sesaat setelah peresmian tampuk kepresidenan Mursi, Arab Saudi merupakan negara pertama yang dikunjungi pihak Mursi. Tujuan kunjungannya adalah untuk memperkuat hubungan antara kedua negara di segala bidang (Furqon, 2012).

Tindakan Arab Saudi pada kudeta atas Mursi memberikan kesan lain dibanding dengan bentuk keterlibatannya pada konflik senjata di negara lain. Maksudnya, keterlibatan Arab Saudi dalam konflik senjata di Timur Tengah memang sangat jelas. Seperti dukungan Arab Saudi dalam konflik di Yaman, Suriah, Libya, dan lain-lain. Pada kasus di Tunisia, Arab Saudi bersifat tidak mengkhawatirkan kebangkitan rakyat di Tunisia, hingga pemerintah Arab Saudi memberikan suaka politik kepada mantan diktator Tunisia Zine El Abidine Ben Ali. Selain itu, dalam kasus Yaman, Arab

Saudi memberikan perlindungan terhadap Abd Mansur Hadi yakni Presiden Yaman yang telah mengundurkan diri. Lain halnya pada kasus kudeta Mesir, Arab Saudi mengambil peranan penting dan bersikap agresif. Raja Abdullah menjadi pemimpin negara pertama yang menyatakan dukungannya pada kudeta atas Presiden Mesir dari Ikhwanul Muslimin, Muhammad Mursi.

Hal yang tak kalah menarik lagi adalah disaat banyaknya pihak yang mengecam Kudeta Mesir, Arab Saudi justru mendukung rezim tersebut. Inggris, Indonesia, Turki, dan lain-lain begitu mengecam Kudeta yang mengorbankan rakyat, masa depan dan demokrasi Mesir. Meninjau laporan dari *AntiCoup Alliance* terkait korban kudeta menyebutkan adanya 2.200 korban jiwa dan puluhan ribu luka-luka (Lupiyanto, 2013). Kudeta Mesir oleh militer merupakan pelanggaran kemanusiaan dan demokrasi terbesar sepanjang sejarah dunia. Oleh sebab itu, menjadi mengherankan jika Arab Saudi dan negara-negara yang mengagungkan demokrasi mendukung kudeta ini. Kecaman-kecaman termasuk dari ulama besar seperti Dr. Yusuf Al Qardhawi pun seolah tidak digubris oleh Arab Saudi. Bahkan, Saudi justru mengultimatum sekutunya di GCC (*Gulf Cooperation Council*), Qatar untuk mengusir Ketua

Persatuan Ulama dunia Dr. Yusuf Qardhawi tersebut yang selama ini bermukim di sana.

Terkait dukungan terhadap Kudeta, Arab Saudi memberikan dukungan baik moril maupun materil. Ia dan sekutunya berjanji akan menyumbang dana sebesar 12 miliar dollar AS, angka itu delapan kali lebih besar dari bantuan rutin AS ke Mesir setiap tahun, yakni mencapai 1,5 miliar dolar AS (Firmansyah, 2013). Tidak hanya itu, pasca kudeta sekalipun Arab Saudi masih menggelontorkan dana pada penguasa baru militer Mesir. Pada tahun 2014, Arab Saudi memberikan kepada Al-Sisi sebesar \$ 20 miliar dollar, sedangkan negara-negara Arab Teluk (GCC) mengumpulkan dana \$ 39 miliar dollar kepada Al-Sisi (Mashadi, Menlu Arab Saudi Saud Al-Faisal : Arab Saudi Tidak Ada Masalah Dengan Ikhwan , 2015). Sikap mendukung tersebut dengan kata lain bentuk konfrontasi terhadap Ikhwanul Muslimin semakin jelas ketika Raja Arab Saudi menjuluki IM sebagai kelompok teroris, disandingkan dengan kelompok Jabhah An-Nusrah dan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) di Suriah. Arab Saudi seolah tidak takut pada gerakan muslim tersebut, padahal IM merupakan organisasi Islam terbesar dan terorganisir di dunia (Nandang burhanudin, 2015). Ditambah, Mursi adalah sesama *sunni* yang menjadi

harapan baru gerakan Islam di Timur Tengah utamanya atas pembelaan Mursi pada bangsa Pablestina (Zulifan, King Salman, Saudi Baru dan Harapan Perubahan, 2015).

Selanjutnya, jika melihat sejarah, sikap Arab Saudi terhadap Ikhwanul Muslimin sangat tidak mengindahkan posisinya. Sebagai negara tempat dimana dua kota suci Makkah-Madinah berada, Saudi memiliki beban historis dan moral untuk merepresentasikan semangat kepemimpinan Islam. Kebijakan politik negara seharusnya berpihak pada jalan Islam. Namun faktanya, Saudi mengambil langkah yang justru meruntuhkan Islam. Banyak keputusan politik yang diambil Saudi justru berafiliasi dengan AS dan Barat. Saudi dan negara-negara teluk yang tergabung dalam GCC mempunyai hubungan mesra dengan AS dan Barat. Saat terjadi *Arab Spring*, Arab Saudi dengan lampu hijau dari Amerika Serikat dan Israel mendukung rezim militer untuk melakukan kudeta dan melengserkan presiden pertama Mesir Muhammad Mursi pada 30 Juni 2013.

Dari paparan di atas, perjalanan sejarah hubungan baik antara IM dan Arab Saudi nyatanya tidak Presiden yang berasal dari organisasi Ikhwanul Muslimin yang dipilih secara demokratis. Sikap Arab Saudi terhadap Kudeta di Mesir pun berbeda dengan

sikapnya pada kudeta negara di Timur Tengah yang lain. Arab Saudi mengambil peranan yang keras untuk mendukung rezim lengsernya Mursi. Saudi mendukung pembantaian dan hukuman penjara bagi Mursi dan anggota-anggota Ikhwanul Muslimin, serta mendukung Presiden militer Marsekal Abdel Fattah Al-Sisi yang jelas menjadi panglima kudeta di bawah Raja Abdullah. Saudi memberikan dukungan yang aktif, dan ini merupakan intervensi urusan dalam negeri Mesir. Selain itu, Raja Arab Saudi, Abdullah memberikan penghormatan kepada Marsekal Al-Sisi dengan penghargaan tertinggi di bidang sipil, yaitu "National Order". Sebagai balasannya, Universitas Al-Azhar Mesir, memutuskan untuk memberikan gelar doktor kehormatan kepada Raja Arab Saudi, Abdullah (Mashadi, Arab Saudi, UEA dan Mesir Pelopor Penghancur Kaum Islamis, 2014).

Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri

Keputusan luar negeri adalah tindakan dan komitmen suatu negara pada lingkungan eksternalnya. Keputusan luar negeri juga dianggap sebagai strategi dasar untuk mencapai kepentingan nasional. Pembuat keputusan akan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh kepada proses pengambilan

keputusan luar negeri tersebut. Individu atau kelompok individu pembuat keputusan tidak dapat mengambil keputusan tanpa pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhinya.

William D. Coplin membagi pertimbangan-pertimbangan di atas menjadi tiga kelompok, berikut pernyataan teoritisnya;

“The foreign policies, instead, are seen as a result of the three considerations that affect foreign policy makers; *first*, the domestic political conditions of the state, including cultural factors that underlie the human political behavior. The *second* is economic and military conditions of the state, including the geographic factor that has always been a major consideration in the defense/security. *Third* is international context, the circumstances of a state that has been goal of the foreign policy and the influence of other states relevant to the faced problems.” (Coplin, 1992).

Aspek kondisi politik domestik (*domestic politic*) adalah suatu kondisi yang tercipta di suatu negara, mencakup berbagai unsur yang mendukung dan mempengaruhinya. Unsur-unsur tersebut mencakup stabilitas keamanan, kapabilitas kelompok kepentingan (*interest group*) dan beberapa aspek lainnya (Yusuf, 1992). Lebih jauh Coplin menambahkan bahwa dalam sistem pengaruh kebijakan terjadi hubungan timbal-balik antara pengambil keputusan dengan *policy influencer*. *Policy influencer* merupakan sumber dukungan bagi penguatan rezim

tertentu dalam suatu negara. Hal tersebut berlaku bagi semua sistem pemerintahan, baik yang demokrasi maupun yang autokrasi. Para pemimpin negara sangat bergantung pada keinginan rakyatnya untuk memberi dukungan. Dukungan itu dapat berupa kesetiaan angkatan bersenjata, keuangan dari para pengusaha, dukungan rakyat dalam pemilihan umum, dan lain-lain. Rezim yang memerintah sangat membutuhkan dukungan tersebut untuk membuat kedudukannya lebih pasti dan kebijakan-kebijakan yang dibuat tepat sasaran sehingga menguatkan legitimasinya.

Kondisi politik suatu negara sangat menentukan produk kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pembuat kebijakan (*decision making*) suatu negara. Kondisi politik dalam negeri mampu mendorong kebijakan luar negeri yang ditujukan untuk memenuhi beberapa kepentingan di dalam negeri. Kepentingan tersebut pada umumnya mencakup pemeliharaan (*preservations*), perolehan (*acquisitions*), dan bentuk antisipatif (Yusuf, 1992). Dengan kata lain, keputusan luar negeri merupakan hasil dari proses politik dalam negeri yang melibatkan berbagai aktor dalam kondisi-kondisi tertentu. Artinya, terjadi interaksi antara pengambil kebijakan luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri

yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri tersebut, atau Coplin menyebutnya dengan *policy influencer*.

Teori pembuatan kebijakan luar negeri menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan pilihan rasional dari aktor-aktor formal pembuat kebijakan, namun juga dipengaruhi oleh konstelasi politik dalam dan luar negeri yang keberadaannya saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kebijakan luar negeri itu sendiri akan mendorong terjadinya pengaruh atau dampak yang kemudian akan mempengaruhi kebijakan itu sendiri atau yang dalam hal ini dikenal dengan *chain of political influencer*.

Sebagaimana William D. Coplin telah memberikan banyak informasi mengenai faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan luar negeri, ia mengelompokkannya dalam tiga hal yang berkenaan dengan faktor psikologis yakni ; penetapan situasi, pemilihan tujuan, dan pemilihan alternatif. Faktor psikologis terkait dengan unsur pemilihan alternatif (*choosing alternatives*) dengan berdasarkan suatu anggapan bahwa pembuatan keputusan adalah merupakan suatu proses intelektual rasional. Maka tujuannya secara eksplisit dan hierarki

dapat dirumuskan sebagai peluang yang diberikan oleh lingkungan.

Variabel-variabel pengaruh dalam pengambilan keputusan politik luar negeri tersebut adalah ; (a) variabel idiosyncratic (variabel individu), variabel ini berkenaan dengan persepsi, citra, dan karakteristik pribadi pembuat keputusan politik luar negeri, (b) variabel peranan (*role*), variabel ini didefinisikan sebagai gambaran pekerjaan atau sebagai aturan-aturan yang diharapkan bagi seseorang yang berkompetensi terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri, (c) variabel birokratik (*governmental*), variabel ini menyangkut pada struktur dan proses pemerintahan serta implikasinya terhadap pelaksanaan politik luar negeri, (d) variabel sosial (*societal*), yakni variabel yang menyangkut identifikasi efek struktur kelas, distribusi pendapatan, status, dan persamaan ras serta agama terhadap politik luar negeri negara-negara tertentu, (e) variabel sistemik (*systemic influences*) dalam variabel ini kita dapat memasukkan struktur dan proses sistem internasional.

Pada negara modern, pembuatan kebijakan luar negeri harus dapat dipertanggungjawabkan pada entitas-entitas politik. Dengan kata lain, pola otoritarianis dalam pembuatan keputusan

akan lebih sulit dijalankan. Hal yang sama juga berkaitan dengan aspek ekonomi-militer, dimana kedua faktor ini sangat menentukan posisi tawar (*bargaining position*) dari negara yang bersangkutan dalam konstelasi politik-keamanan regional ataupun internasional. Analisa Coplin tentang faktor ekonomi dan militer dalam mempengaruhi pengambilan keputusan berangkat dari perilaku raja-raja Eropa abad pertengahan. Ekonomi dan militer merupakan dua variabel yang saling berkaitan satu sama lain. Ketika kemampuan militer meningkat, maka akan meningkatkan kemakmuran secara ekonomi para raja (Coplin, 1992). Dan sebaliknya, ketika kemampuan ekonomi semakin kuat maka akan berimbas pada peningkatan kekuatan militernya. Kedua variabel ini juga yang menurut Coplin menjadi modal utama negara-negara Eropa menjajah Asia dan Eropa. Perusahaan-perusahaan dagang Eropa datang tidak hanya membawa misi ekonomi, namun lebih kepada penaklukan wilayah dengan dukungan kekuatan militer yang lebih kuat.

Tindakan politik luar negeri (*foreign policy act*) menjelaskan mengapa suatu negara berperilaku tertentu terhadap negara lain. Tindakan politik luar negeri ini berkaitan dengan geopolitik suatu negara dan ilmuwan realis telah

memberikan penjelasannya. Menurut Coplin ada 3 elemen dasar dalam menjelaskan dampak konteks internasional terhadap kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis, dan politis (Coplin, 1992). Lingkungan internasional setiap negara merupakan wilayah yang ditempatinya berkenaan dengan lokasi dan kaitannya dengan negara-negara lain dalam sebuah sistem politik internasional. Keterkaitan tersebut termasuk dalam bidang ekonomi dan politik.

Setelah membahas kajian di atas, jika dikaitkan dengan keputusan luar negeri Arab Saudi dalam mendukung kudeta Mesir atas Mursi, ketiga konsiderasi Coplin di atas sangatlah sejalan. Berikut penjelasannya :

1. Kondisi Politik dalam Negeri Arab Saudi

Kondisi politik dalam negeri merupakan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan baik dalam negeri itu sendiri maupun dalam hubungannya dengan negara lain. Hal ini jelas bahwa politik domestik dapat dipahami sebagai dinamika politik internal negara atau hanya sebagai sistem politik yang diadopsi. Kondisi politik domestik juga termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik masyarakatnya.

Sistem pemerintahan Arab Saudi adalah monarki berdasarkan Islam. Pemimpin pemerintahannya adalah Raja yang sekaligus panglima militer tertinggi. Raja dibantu oleh 22 Dewan Menteri/Kabinet. Raja juga disarankan oleh Badan Legislatif/Dewan Konsultasi (Majlis Asy Syura). Jalannya pemerintahan didasarkan pada syari'ah (hukum Islam) yang menjwai sifat negara, tujuan dan tanggungjawabnya, serta hubungan antara penguasa dan warga. Karena SA merupakan negara Islam, maka sistem peradilanannya pun sesuai syari'ah (hukum Islam).

Berangkat dari kondisi pemerintahan SA yang monarki, kondisi tersebut bertentangan dengan ideologi atau sistem demokrasi IM yang direpresentasikan oleh Mursi. Belajar dari revolusi *Arab Spring* yang menjatuhkan lima pemimpin negara yang otoriter, yakni Zine El Abidine Ben Ali (Tunisia), Hosni Mubarak (Mesir), Muammar Khadafi (Libya), Ali Abdullah Saleh (Yaman) dan Ahmad Al Audah (Suriah). Dan fakta bahwa pengaruh IM semakin meluas di Timur Tengah dan juga dunia. SA semakin merasa terancam. Sistem monarki yang masih dipertahankan oleh SA terancam oleh merebaknya pengaruh demokrasi sebagai dampak dari *Arab Spring*.

Konstelasi politik Arab mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Perubahan peta politik itu terutama disebabkan oleh perang *proxy* yang ikut mempengaruhi kondisi mutakhir di Mesir dan Suriah. Dua negara yang dapat dijadikan referensi dalam memetakan politik di Timur Tengah. Arus seperti ini, tidak dapat dibendung oleh SA yang *notabene* kehilangan identitas politiknya. Makasudnya, sikap SA yang seringkali berafiliasi dengan negara non muslim/AS mengakibatkan kehilangan kredibilitasnya di mata negara-negara Timur Tengah.

2. Keadaan Ekonomi dan Militer

Kemampuan ekonomi militer negara sangat mempengaruhi hasil pembuatan keputusan luar negerinya (Jatmika, 2000). Kondisi ekonomi negara juga dapat menjadi gambaran kondisi politik negara. Artinya, posisi internasional suatu negara sangat dipengaruhi oleh politik internal dan kondisi ekonomi. Dalam hal ini, Coplin melihat kebijakan luar negeri negara tidak terlepas dari ekonomi dan militernya.

Pada tahun 1932, yakni setelah berdirinya kerajaan SA modern, perekonomian masyarakat SA bergantung pada pertanian, terutama ekspor kurma. Namun pada tahun 1938, perekonomian

SA mengalami perubahan pasca ditemukannya sumber minyak dan proses komersialisasinya. Sampai pada sekarang, ekonomi pasar bebas SA telah mengalami perubahan yang luar biasa dalam waktu yang relatif singkat. Dibuktikan dengan SA merupakan produsen dan eksportir minyak terbesar di dunia (Zulifan, Mengenal Arab Saudi, Negeri Para Nabi, 2015).

Selama pemerintahan Raja Abdullah, ia menggunakan kekayaan minyak untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan memangkas pengangguran. Abdullah juga menggelontorkan dana hingga 130 miliar dolar AS untuk meningkatkan perekonomian guna mengantisipasi pemberontakan yang mengguncang negara-negara Timur Tengah. Di bawah pemerintahan Abdullah, PDB Arab Saudi tumbuh cukup pesat. Berdasarkan IMF pada 1996, Produk Domestik Bruto (PDB) negara ini sebesar 163 miliar dolar AS (Jatmiko, 2015). Di bawah Raja Abdullah juga produksi minyak SA mengalami kenaikan sebesar 30 persen. Pada tahun 2013, PDB Arab Saudi sebesar \$748.4 miliar (Economis, 2013). Dalam laju ekspor minyak SA, Cina merupakan negara yang menduduki peringkat paling tinggi sebagai penerima ekspor minyak SA.

Arab Saudi mewakili lebih dari 20% (seperempat dari PDB dunia Arab,

menurut data IMF terbaru) dari gabungan PDB gabungan dari Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Pasar saham Arab mewakili lebih dari 50% dari seluruh kapitalisasi pasar saham dari kawasan MENA (Council, 2013). Dan pasar SA terdaftar membuat lima dari sepuluh perusahaan di wilayah tersebut. Saudi ARAMCO dan SABIC menjadi dua perusahaan konglomerat SA. Badan Moneter Saudi Arabia (SAMA) dan bank sentral kerajaan adalah pemegang cadangan devisa terbesar ketiga di dunia. Selanjutnya, Saudi Aramco, perusahaan minyak nasional kerajaan adalah produsen terbesar di dunia dengan produksi berkelanjutan sekitar 12.5 juta barel per hari. Dan memiliki cadangan terbesar di dunia, saat ini diperkirakan 2.5 juta barel per hari atau sekitar 70% dari kapasitas global yang tidak terpakai (Council, 2013).

Dalam kaitannya dengan dukungan meteril SA terhadap kudeta, dapat dikatakan bahwa SA mampu untuk pendanaan pra dan pasca kudeta. Dana sebesar \$5 miliar yang dihibahkan SA kepada pemerintah Mesir pasca kudeta, atau dengan kata lain 3.06% dari PDB SA yang sebesar \$163 miliar, terbilang nominal kecil untuk menjatuhkan dominasi IM di Timur Tengah. Sehingga, sangatlah memungkinkan bagi SA untuk menghibahkannya.

Pada periode kepemimpinan Raja Abdullah, SA mampu mempertahankan stabilitas keamanan, meskipun negara-negara di kawasan Timur Tengah tengah dilanda *Arab Spring*. Didukung oleh kondisi militer SA yang mumpuni, dari 10 daftar negara Islam terkuat di dunia tahun 2013, SA menempati posisi ke enam setelah Indonesia. Keterangan detail armada perang SA; Tentara: 258.500, Pesawat: 1200, Helikopter: 314, Kapal Angkatan Laut: 77, Anggaran Pertahanan: 39,2 miliar dollar AS dan Daya Beli: 622 miliar dollar AS (Asrol, 2013).

Sejumlah negara di Timur Tengah meningkatkan anggaran militer mereka pada 2013 dengan menghabiskan dana triliunan rupiah. Menurut *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), Arab Saudi memiliki anggaran tertinggi, bahkan menduduki posisi keempat di dunia (Choirul, Anggaran Militer Arab Saudi Rp 766 Triliun, 2014). Artinya, anggaran militer SA lebih tinggi daripada Inggris, Jepang dan Prancis. Secara militer SA sangat mumpuni, ditambah dengan besarnya anggaran militernya yang besar, sehingga dapat kapan saja menambah persenjataan maupun perlengkapan militer lainnya.

3. Konteks Internasional

Aspek berikutnya adalah keterkaitan tindakan politik luar negeri

Saudi berdasarkan konteks internasional. Pada penghujung tahun 2010 hingga 2011, kawasan Timur Tengah mengalami pergolakan politik yang dikenal dengan *Jasmine Revolution*. Suatu revolusi yang bertujuan untuk menumbangkan rezim otoriter dan menggantikan dengan sistem demokrasi (Ardiyansyah, 2010). Revolusi ini merupakan ancaman bagi Saudi dan Mesir yang memiliki sistem pemerintahan otoriter. Namun pula keuntungan bagi Mesir yang sesaat setelah revolusi memiliki Presiden baru Mursi yang dipilih secara demokratis pada tahun 2012. Ditambah dengan peristiwa *Arab Spring* 2011 yang ditandai dengan demonstrasi massa secara masif dan diakhiri dengan tumbangnyanya beberapa rezim yang sudah berkuasa selama puluhan tahun. Di Mesir, peristiwa diakhiri dengan tumbangnyanya rezim yang berkuasa, Husni Mubarak.

Arab Spring di Mesir berlanjut pada proses demokratisasi yang ditandai oleh terlaksananya pemilu secara demokratis. Ikhwanul Muslimin yang pada awalnya mengalami penindasan politik, akhirnya dapat memenangkan pemilu. Nilai-nilai yang dibawa IM juga berpengaruh pada proses demokratisasi di Libya dan Tunisia misalnya. Negara-negara tersebut menyadari bahwa IM membawa udara baru politik yang lebih

baik di kawasan Arab. Ini merupakan ancaman bagi hegemoni Arab Saudi. Sehingga, ia begitu geram pada eksistensi IM saat itu.

Konteks internasional yang menjadi alasan dukungan SA terhadap kudeta adalah, *pertama*, keamanan. Keamanan memiliki pengertian yang universal, namun keamanan dapat digambarkan sebagai suatu kebebasan dari suatu ancaman, bahaya, resiko kecemasan dan keraguan. Dalam hubungan internasional, keamanan adalah kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan *independent identity* dan *functional integrity* (M.Saeri, 2014). Menurut Mutiah Alagappa, ada empat elemen yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan konsep-konsep keamanan berkaitan dengan pemikiran tradisional dan kontemporer, yaitu (Kurniawan, 2004) : Pihak yang perlu mendapatkan jaminan keamanan, nilai-nilai utama dalam masalah keamanan, bentuk dan sifat ancaman, dan pendekatan-pendekatan keamanan yang digunakan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa SA mendapatkan ancaman bagi kelangsungan sistem monarkinya. Ancaman tersebut muncul dari pemimpin IM di Mesir. Yakni Mursi. Sesudah rezim diktator Marsekal Hosni Mubarak jatuh akibat revolusi, lahirlah

presiden sipil pertama di bawah Muhammad Mursi, para pemimpin negara Teluk seperti Kerajaan Saudi Arabia menghadapi kecemasan yang sangat akibat gelombang revolusi. Negara Teluk khususnya SA berusaha untuk mencegah dan meminimalisir pengaruh revolusi agar tidak memberikan efek kepada pemerintahan dan rakyat.

Alasan lainnya adalah karena SA ingin mengembalikan kembali rezim Husni Mubarak yang mana menjadi sekutu SA. Dengan menjatuhkan Mursi, dan digantikan oleh Presiden sementara Adly Mansur yang pernah menjabat sebagai konsultan selama delapan tahun di SA. Kemudian diganti dengan Presiden tetap Al Sisi yang merupakan kolega Raja Abdullah dan kaki tangan Husni Mubarak, maka akan sangat mudah bagi SA untuk membunuh pengaruh IM, yang selanjutnya menumbuhkan kembali semangat rezim otoriter Husni Mubarak. Artinya, SA tidak menginginkan ideologi demokrasi yang dibawa Mursi mempengaruhi hegemoninya di Timur Tengah. Karena SA ingin tetap memainkan peranan penting di kawasan tersebut. Singkatnya, peran SA ingin mempertahankan Mesir agar tetap aman dan tidak keluar jalur yang diinginkan SA, negara Teluk dan Zionis-Israel, bukan pemerintahan Islam yang akan membahayakan keamanan mereka.

Melihat peristiwa tahun 2011, Mubarak terjungkal dari posisi kekuasaannya melalui revolusi Mesir. Dengan satu tujuan utama untuk menggulingkan rezim otoriter tersebut, semua faksi termasuk IM bersatu melengserkan pengganti Anwar Sadat ini dari kekuasaannya. Revolusi Mesir lintas negara-negara Timur Tengah lainnya untuk membuka pintu revolusi. Mubarak dijebloskan ke penjara dengan banyak alasan. Selain dituding bertanggungjawab atas tewasnya ratusan demonstran pada 2011, dia dianggap menyalahgunakan kekuasaan. Rezim Mubarak dituduh sarat akan skandal korupsi dan kesewang-wenangan. Namun, saat Mursi menjabat, pengadilan kerap kali gagal menyidangkan Mubarak, sehingga selama dua tahun dia dipenjara dan tidak pernah dimeja-hijaukan (Nuroyono, 2013). Alih-alih dibebaskan pada tanggal 21 Agustus 2013, ternyata di pengadilan Mesir banyak sekutu Mubarak. Pembebasannya didasarkan atas dalih hukum di Mesir mengatur bahwa terdakwa yang tidak divonis pengadilan lebih dari dua tahun, tidak bisa ditahan. Masa penahanan Mubarak sudah mencapai dua tahun, maka menurut Abdellaty, Mubarak boleh tinggal di rumah (Ichsan, 2013). Sehingga, pengadilan menyatakan tidak ada dasar hukum untuk melanjutkan penahanan Mubarak.

Alasan berikutnya adalah karena kolega SA memiliki kepentingan masing-masing terhadap IM dan Mesir. Seperti, UEA, lawan politik Presiden Muhammad Mursi yaitu Marsekal Ahmed Shafik, ia adalah mantan perdana menteri pada era Mubarak yang sekarang menjabat sebagai konsultan untuk Presiden UEA. Ia tidak dapat mengenyampingkan sikap UEA yang sangat anti IM. Sehingga jelas, UEA memiliki kepentingan guna melanggengkan kekuatan status quo yang lama di Mesir. Fakta lainnya, bahwa tokoh-tokoh sisa rezim Mubarak memegang peranan penting dalam gerakan oposisi yang menggulingkan Mursi. Hal ini menjelaskan mengapa jutaan dolar mengalir dari UEA ke oposisi Mesir. Hal ini juga membuktikan bahwa UEA memiliki hubungan sangat erat dengan orde lama Mesir dan tetap dalam bayangan SA, yang menjadi agen kerjasama internasional yang berfokus pada Mesir.

Selain itu, SA berkolega dengan Zionis-Israel. Menurut Zionis-Israel, Mesir adalah tempat yang strategis untuk melancarkan penjajahannya. Zionis Israel tidak hanya ingin menumbangkan Mursi, tetapi juga kendaraan politik yang mengantarkan Mursi menjadi Presiden, yakni organisasi IM. Bagi Israel, IM harus dicabut hingga akar-akarnya, sebab ideologi IM berkembang di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Gerakan

perlawanan Islam Hamas di Gaza diyakini sebagai perpanjangan tangan dari IM. Sehingga, menamatkan IM di Mesir setidaknya dapat melemahkan kekuatan Hamas di Gaza.

KESIMPULAN

Hubungan baik antara Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin terjalin atas beberapa alasan. Diantaranya, menjaga perdamaian dengan bangsa lain, menjaga hubungan politik yang lebih dinamis, rasa solidaritas, mengambil pembelajaran positif dari bangsa lain, dan lain-lain. Secara historis, Raja Abdul Aziz adalah inspirasi dari salafisme Al Banna. Sejak 1928, Al Banna membangun kemitraan dengan beberapa tokoh penting Arab Saudi, hingga akhirnya tahun 1936 ia melaksanakan ibadah haji. Hubungan baik tetap terjaga pada era kepemimpinan Hasan Hudhaibi, SA menjadi mediator konflik antara IM dan Gamal Abdul Nasser.

Hubungan baik antara keduanya berlanjut pada dukungan materil SA kepada IM. Sejak awal tahun 1936, Wakil Menteri Keuangan Muhammad Srouf Al Farhan di bawah perintah Raja Abdul Aziz konsisten memberikan bantuan rutin kepada IM. Berlanjut pada hubungan SA dan IM era Muhammad Mursi, sesaat setelah terpilihnya Mursi sebagai Presiden

Mesir, SA adalah negara pertama yang dikunjungi Mursi. Tanggapan SA atas kunjungan tersebut pun baik.

Terkait kudeta di negara-negara Timur Tengah, SA menunjukkan sikap dan respon yang berbeda-beda kepada satu negara dengan negara lainnya. Hal itu dipengaruhi oleh kepentingan nasional yang dibawanya. Dalam kudeta Turki, SA menyambut kesuksesan Presiden Erdogan dalam menggagalkan kudeta militer. Pada bulan Maret 2015, bentuk intervensi SA dalam kudeta Yaman adalah memimpin serangan udara dan blokade laut. Respon SA terhadap kudeta di Tunisia tidak se-agresif responnya terhadap kudeta di Mesir. Terhadap kudeta di Suriah, SA menunjukkan keprihatinan dan kesedihan mendalam atas kedzaliman yang terjadi di Suriah. Berbeda dengan kudeta di negara-negara Timur Tengah sebelumnya, sikap SA terhadap kudeta di Mesir lebih terkesan agresif.

Enam hari setelah penggulingan Mursi, SA kembali menunjukkan dukungan aktifnya terhadap kudeta. SA mengumumkan bahwa ia menyumbangkan dana US\$ 5 miliar untuk Mesir. Bukan itu saja, SA menjanjikan akan memberikan bantuan keuangan non stop jika negara-negara Barat menghentikan bantuannya kepada Mesir. Alasan SA mendukung kudeta didorong oleh tiga hal, yakni

keadaan politik dalam negeri SA, kondisi ekonomi dan militer SA dan konteks internasional. Sistem pemerintahan SA yang monarki absolut mendapat ancaman dari pengaruh IM yang membawa rezim demokrasi. Sehingga, tindakan SA dalam mendukung kudeta atas Mursi adalah untuk menghapuskan pengaruh IM yang dianggap menjadi ancaman bagi kelangsungan sistem monarkinya. Tindakannya didukung pula oleh kapabilitas ekonomi dan militer SA. Dengan keadaan ekonomi dan militer yang kuat, SA dapat dengan mudah untuk melancarkan dukungannya. Alasan lainnya adalah faktor konteks internasional, SA ingin mengembalikan kembali rezim Husni Mubarak yang mana menjadi sekutu SA. Alasan berikutnya adalah karena kolega SA memiliki kepentingan masing-masing terhadap IM dan Mesir. Dan SA ingin membantu koleganya untuk melancarkan kepentingannya di Mesir.

Di samping ada pihak yang mendukung kudeta Mesir, adapula pihak yang begitu mengecam. Misalnya, Uni Eropa melalui Kepala Kebijakan Luar Negeri, Catherine Ashton mengecam kudeta Mesir. Ennahda Rachid Ghannouchi, pemimpin partai mewakili para islamis di Tunisia menyatakan keheranannya terhadap kudeta. Ia begitu tidak sepakat terhadap penggulingan pimpinan yang dipilih secara demokratis, sebab hasilnya akan menumbuh-suburkan radikalisme. Adapun Inggris, Inggris tidak mendukung intervensi militer sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa dalam sistem demokrasi. Begitupun dengan Amerika Serikat yang digadang-gadang ada di balik kudeta, ternyata menyatakan keprihatinannya. Bagi Jerman, intervensi militer adalah kemunduran besar bagi demokrasi Mesir. Indonesia pun begitu mengecam kudeta yang meruntuhkan demokrasi Mesir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahira, A. (2011). *Sistem Pemerintahan Arab Saudi*. AnneAhira.com.
- Ardiyansyah, K. (2010). Dukungan Arab saudi terhadap Kudeta Mesir Tahun 2013. *Kaza*, 1.
- Asrol, M. (2013). *10 Negara Muslim Terkuat di Dunia*. Beureunun:
<http://thezspark.blogspot.co.id/2013/01/10-negara-muslim-terkuat-di-dunia.html>.
- Assegaf, F. (2015). *Kekayaan Aset Arab Saudi Terbesar di Timur Tengah*. Doha: Arabian Business.
- Choirul. (2014). *Anggaran Militer Arab Saudi Rp 766 Triliun*. Al Jazeera: Tempo.CO.
- Choirul. (2014). *Anggaran Militer Arab Saudi Rp 766 Triliun*. Al Jazeera:
<https://m.tempo.co/read/news/2014/04/15/115570724/anggaran-militer-arab-saudi-rp-766-triliun>.
- Coplin, W. D. (1992). *Introductions to International Politic, A Theoretical Overview*. Bandung: CV. Sinar Baru.
- Council, M. E. (2013). Saudi Arabian's Foreign Policy. *Journal Essay*, 1.
- Economis, T. (2013). *Arab Saudi - PDB Per Kapita*. Lisbon:
<http://id.tradingeconomics.com/saudi-arabia/gdp-per-capita>.
- Firmansyah, T. (2013). Karut-Marut Politik Arab. *Republika Online*.
- Furqon. (2012). *Mursi akan Kunjungi Arab Saudi dalam Perjalanan Luar Negeri Pertamanya sebagai Presiden Mesir*. Jakarta: Era Muslim.
- Ichsan, A. S. (2013). *Pemerintah Mesir : Mubarak Bisa Tinggal di Rumah*. Jakarta:
<http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/08/22/mrwnay-pemerintah-mesir-mubarak-bisa-tinggal-di-rumah>.
- Jatmika, S. (2000). AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat. *Jurnal Hubungan Internasional*, 161.

- Jatmiko, B. P. (2015). *Kiprah Raja Abdullah Memodernisasi Ekonomi Arab Saudi*. Jakarta:
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/23/143437826/Kiprah.Raja.Abdullah.Memodernisasi.Ekonomi.Arab.Saudi>.
- Kurniawan, R. (2004). Strategi Keamanan Amerika Serikat dalam Merespon Ancaman Senjata Biologi dari Rogue State dan Terrorist Group. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional antar Bangsa* , 284-285.
- Lupiyanto, R. (2013). Peta Geopolitik Krisis Mesir. *Kolom Opini The Globe Journal*, 1-2.
- M.Saeri, K. &. (2014). Dukungan Arab Saudi terhadap Kudeta Mesir Tahun 2013. *Transnasional Vol.5 No.2*, 4.
- Mashadi. (2014). Arab Saudi, UEA dan Mesir Pelopor Penghancur Kaum Islamis. *VOA Islam*.
- Mashadi. (2015). *Menlu Arab Saudi Saud Al-Faisal : Arab Saudi Tidak Ada Masalah Dengan Ikhwan* . Bekasi: VOA Islam.
- Nandang burhanudin, L. (2015). Raja Salman dan Masa Depan Ikhwanul Muslimin. *dakwatuna.com*.
- Nuroyono, B. (2013). *Penguasa Mesir Bebaskan Husni Mubarak*. Jakarta:
<http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/08/19/mrrzz7-penguasa-mesir-bebaskan-husni-mubarak>.
- Pilihan, A. K. (2015). Raja Abdullah bin Abdul Aziz, Reformis Arab Saudi. *Muslim*.
- Wadjdi, F. (2013). *Akar Konflik Arab Saudi V.S. Ikhwanul Muslimin*. Jakarta: Kompasiana.
- Yusuf, S. (1992). *Hubungan Internasional : Telaah dan Teoritis (Teoritical Overview buku Wiliam D. Coplin)*. Bandung: Pustaka Sinar Baru.
- Zulifan, M. (2015). King Salman, Saudi Baru dan Harapan Perubahan. *Selasar Politik*.
- Zulifan, M. (2015). *Mengenal Arab Saudi, Negeri Para Nabi*. Riyadh: Dunia TimTeng.

